

**Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal Dan
Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Kabupaten Sumbawa**

¹Diva Alifia Ikhsanti, ²Baiq Kisnawati, ³Rusdi

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM

¹divaalifaiikhsanti@gmail.com, ²baiqkisnawati63@gmail.com, ³rusdi.m85@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to investigate how the financial performance of local government agencies (OPD) in Sumbawa Regency is affected by the use of information technology, internal control, and accounting information systems. Thus, the dependent variable in this study is financial performance (Y), while the independent factors are accounting information systems (X3), internal control (X2), and the use of information technology (X1). Employees of OPDs in Sumbawa Regency who work in finance or treasury are the study population. This study uses quantitative and associative methods. Purposive sampling and stratified random sampling methods were used to select the sample. 44 members of finance or treasury staff from OPDs in Sumbawa Regency were sampled. Forty-four online surveys were distributed using Google Forms to collect data. SPSS 25 was used to analyse the data using multiple linear regression and traditional assumption tests. The findings indicate that the financial performance of OPDs is not significantly affected by the use of information technology. On the other hand, the financial performance of OPDs is significantly improved by internal control and accounting information systems.

Keywords: Information technology utilisation, internal control, and accounting information systems

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana kinerja keuangan lembaga pemerintah daerah (OPD) di Kabupaten Sumbawa dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi, pengendalian internal, dan sistem informasi akuntansi. Dengan demikian, variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan (Y), sedangkan faktor independennya adalah sistem informasi akuntansi (X3), pengendalian internal (X2), dan penggunaan teknologi informasi (X1). Karyawan OPD Kabupaten Sumbawa yang bekerja di bidang keuangan atau perbendaharaan menjadi populasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan bersifat asosiatif. Metode purposive sampling dan stratified random sampling digunakan untuk memilih sampel. 44 anggota staf keuangan atau perbendaharaan dari OPD Kabupaten Sumbawa menjadi sampel. 44 survei daring didistribusikan menggunakan Google Forms untuk mengumpulkan data. SPSS 25 digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan regresi linier berganda dan uji asumsi tradisional. Temuan menunjukkan bahwa kinerja keuangan OPD tidak terpengaruh secara signifikan oleh penggunaan teknologi informasi. Di sisi lain, kinerja keuangan OPD ditingkatkan secara signifikan oleh pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi.

Kata Kunci: Pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal, dan sistem informasi akuntansi

PENDAHULUAN

Dampak berbagai perubahan di era globalisasi saat ini mengharuskan organisasi pemerintah daerah untuk peka terhadap tren perubahan ini agar dapat menyusun rencana dan kebijakan yang selaras dengan perubahan lingkungan. Hal ini bergantung pada kemampuan kinerja keuangan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Proses mengevaluasi seberapa baik suatu organisasi menggunakan peraturan pelaksanaan keuangan untuk menjalankan operasinya dikenal sebagai kinerja keuangan. Pemerintah daerah sebagai

penyelenggara layanan publik harus mampu mengelola keuangannya secara optimal, tidak hanya untuk memenuhi tanggung jawab administratif, tetapi juga untuk menjawab ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap kinerja birokrasi. Organisasi sektor publik bertugas melaksanakan operasi pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan dalam berbagai bidang. Organisasi-organisasi ini sering kali terhubung dengan pemerintah atau badan usaha milik pemerintah (Nurillah, 2014).

Akuntabilitas kini dituntut secara luas sebagai cara untuk meminta pertanggungjawaban publik atas kinerja pemerintah. Laporan kinerja keuangan merupakan salah satu pendekatan untuk menunjukkan akuntabilitas ini. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah federal, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Informasi lebih lanjut mengenai hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah telah melakukan perubahan dalam pengelolaan keuangan negara dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Undang-undang ini mengatur struktur anggaran negara, termasuk pendanaan anggaran, pendapatan negara, dan belanja negara. Sebelum dilaksanakan, alokasi anggaran untuk kementerian dan lembaga yang sedang berkembang atau dibentuk harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui lembaga terkait. Peraturan Pemerintah (PP Nomor 71 Tahun 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga telah diterbitkan oleh pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun daerah wajib mematuhi standar akuntansi yang ditetapkan dalam SAP ini. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024, pedoman akuntansi yang ditetapkan dalam PP ini wajib dipatuhi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk mencapai tujuan tata kelola pemerintahan yang bersih, pemerintah daerah harus berhasil mengelola keuangannya. Kemampuan untuk menangani kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan tanda pengelolaan keuangan daerah yang kompeten. Akan terjadi kerugian daerah, kekurangan penerimaan kas, kesalahan administrasi, inefisiensi, dan inefektivitas jika informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah tidak memenuhi persyaratan kualitatif laporan keuangan pemerintah sebagaimana yang digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan jika data yang dikandungnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Pemerintah daerah memanfaatkan laporan keuangan sebagai metode untuk memberikan informasi terkini kepada publik tentang kondisi keuangan mereka. Kinerja dan tanggung jawab pengelolaan anggaran keuangan selama periode waktu tertentu dijelaskan melalui laporan keuangan yang memuat uraian kuantitatif dan kualitatif yang dapat diukur mengenai kegiatan yang telah dilakukan serta penggunaan anggaran. (Puspita dkk., 2021).

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan rumah bagi Kabupaten Sumbawa. Kabupaten Sumbawa dikenal memiliki banyak potensi di bidang pariwisata, pertanian, peternakan, dan perikanan. Karena PAD merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah dalam mendorong perekonomian daerah otonom, upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk meningkatkan PAD sangat penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Pembangunan di Kabupaten Sumbawa membutuhkan biaya yang signifikan, yang dapat mengakibatkan peningkatan belanja pemerintah. Kabupaten Sumbawa harus memanfaatkan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan sistem informasi akuntansi untuk meningkatkan kinerja keuangan dan membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Mengingat kapasitas keuangan daerah Kabupaten Sumbawa masih terbatas dan belum mandiri, permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah menjadi krusial. Mengingat pembangunan daerah dibiayai oleh dana daerah (Sultan, 2022).

Kabupaten Sumbawa masih menghadapi kesulitan dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas fiskal. Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Sumbawa pada beberapa tahun terakhir, masih ada sejumlah catatan, terutama terkait dengan pengelolaan aset tetap, penatausahaan pendapatan, dan penggunaan belanja daerah. Selain itu, indeks keterbukaan informasi publik di daerah belum mencapai tingkat kinerja terbaik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja keuangan masih belum stabil, masyarakat masih belum menerima informasi yang mereka butuhkan. (Saputra et al., 2025)

Ketentuan mengenai penyampaian laporan data bulanan dan informasi keuangan daerah, beserta ketentuan mengenai penyampaian laporan pemerintah daerah lainnya, harus diatur ulang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyampaian laporan tersebut dan mempercepat evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Keunggulan teknologi informasi telah diakui dengan baik dan mencakup kemampuan multiproses, akurasi perhitungan, penyimpanan data yang luas, pengurangan biaya

pemrosesan, kecepatan pemrosesan transaksi, serta penyusunan laporan. Namun, kurangnya aturan yang tepat, infrastruktur yang tidak memadai, dan keterbatasan sumber daya manusia menyulitkan banyak pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan teknologi. Implementasi teknologi informasi mahal, yang berarti bahwa teknologi saat ini mungkin tidak dapat berfungsi seefisien seharusnya, yang akan mengakibatkan biaya tambahan. Jika kapasitas yang memadai tidak didukung oleh teknologi informasi, hal itu mungkin tidak selalu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. (Komarasari, 2013)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SPIP berupaya menjamin hal-hal berikut dalam PP ini: (a) terselenggaranya kebijakan pemerintah daerah secara efektif dan efisien; (b) menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya; (c) perlindungan kekayaan negara; dan (d) ketaatan terhadap hukum dan peraturan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) akhir-akhir ini menjadi fokus perhatian banyak orang. Oleh karena itu, kelemahan SPI menjadi sorotan BPK dan lembaga pengawas lainnya, sehingga dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran. (APBN/APBD). (Nurillah & Muid, 2014).

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas serta kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumbawa, penyusunan laporan keuangan membutuhkan kemampuan dan kemahiran tertentu. Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa berkualitas buruk akibat berbagai kasus. Sementara itu, karena teknologi informasi belum dianggap penting, terkadang sangat sulit untuk mengakses data, informasi, dan sumber pengetahuan yang dibutuhkan masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Sumbawa Besar. (Lubis, 2019).

Menurut Defitri (2018) Persyaratan pemangku kepentingan harus dipenuhi oleh Sistem Informasi Akuntansi dan data yang ditampilkan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah. Fondasi untuk membuat laporan keuangan untuk pemerintah daerah juga adalah Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Sistem ini memungkinkan untuk mencatat transaksi keuangan secara akurat, metode, dan sesuai dengan aturan akuntansi pemerintah. Namun demikian, tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dengan baik atau yang sesuai dengan persyaratan perusahaan sektor publik. Untuk mencegah kesenjangan komunikasi antara pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan, pejabat pemerintah daerah harus memiliki pemahaman yang ilengkap tentang anggaran yang telah dibuat pemerintah daerah. Tingkat kepuasan

iyang idiperoleh idigunakan iuntuk imengukur itingkat ikeberhasilan isistem iaplikasi. Oleh karena itu, sistem aplikasi yang dapat mendukung dan memfasilitasi proses pengolahan data diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan berkualitas tinggi. Kehadiran aplikasi yang berkualitas tidak diragukan lagi akan memuaskan pengguna. Penulis berupaya untuk melakukan penelitian ini berdasarkan informasi latar belakang yang disebutkan di atas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dan merupakan investigasi asosiatif. Rumusan masalah penelitian yang dikenal sebagai penelitian asosiatif mengkaji hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2021). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana organisasi instansi pemerintah di Kabupaten Sumbawa dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal, dan sistem informasi akuntansi.

Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data di mana partisipan diberikan pertanyaan tertulis untuk dijawab. Kuesioner dapat berupa kuesioner tertutup atau terbuka dan dapat diberikan kepada responden secara daring atau langsung (Sugiyono, 2021).

Subjek penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada bidang keuangan dan perbendaharaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumbawa. Kabupaten Sumbawa mempunyai total 32 OPD yang meliputi kantor, instansi, dan kecamatan. Dari jumlah tersebut, peneliti memilih 22 OPD sebagai sampel penelitian. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan fokus pada staf bendahara dan keuangan di OPD Kabupaten Sumbawa. Persyaratannya adalah sebagai berikut: (1) pegawai di bidang keuangan atau perbendaharaan; (2) berstatus pegawai negeri sipil; (3) pegawai dengan masa kerja minimal dua tahun; dan (4) bergelar sarjana, idealnya di bidang akuntansi. Pengambilan sampel secara acak berstrata, yang memilih sampel secara acak dari setiap strata yang telah ditentukan, diterapkan setelah unit-unit memenuhi standar yang dipersyaratkan. Departemen, Badan, dan Kantor adalah tiga jenis OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang digunakan dalam hal ini.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator
1	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)	• Hardware (perangkat Keras) • Software (Perangkat Lunak) • Database (Basis Data) • Network (Fasilitas Jaringan dan Komunikasi) • People (Orang)
2	Pengendalian Internal (X2)	• Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

		• Penilaian Risiko (Risk Assesment) • Aktivitas Pengendalian (Control Activities) • Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)
3	Sistem Informasi Akuntansi (X3)	• Hardware (Perangkat Keras) • Software (Perangkat Lunak) • Manusia (Brainware) • Prosedur (Procedure) • Jaringan Komunikasi (Communication Network)
4	Kinerja Keuangan (Y)	• Review Data Laporan • Menghitung • Membandingkan atau Mengukur • Menginterpretasi • Solusi

Sumber: Data diolah, 2025

Analisis data yang dilakukan menggunakan SPSS 25 menggunakan analisis regresi linier berganda, uji kualitas data (validitas dan reliabilitas), uji asumsi tradisional (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), serta uji hipotesis (signifikansi perifer, koefisien determinasi, dan simultan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja keuangan, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan penggunaan teknologi informasi merupakan beberapa variabel dalam penelitian ini. Model analisis data penelitian ini, yaitu rumus regresi linier berganda, menghasilkan temuan-temuan berikut:

Tabel 2. Hasil Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.581	.388		6.659	.000
	X1	-.024	.125	-.032	-.191	.850
	X2	.206	.093	.348	2.215	.033
	X3	.215	.103	.375	2.083	.044

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS Data Primer Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 3 persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 2.581 - 0,024 X_1 + 0,206 X_2 + 0,215 X_3 + i_e$$

Berdasarkan tabel, diketahui bahwa nilai koefisien dari variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1) -0.024, pengendalian internal (X2) 0.206, dan sistem informasi akuntansi (X3) 0.215.

Dari persamaan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstan ditunjukkan dengan nilai B sebesar 2,581. Asumsi nilai konstan tersebut menunjukkan bahwa nilai kinerja keuangan adalah 2,581 unit jika variabel pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi tetap sama.
- b. Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan software SPSS, diperoleh koefisien regresi antara pemanfaatan teknologi informasi (X1) dengan kinerja keuangan (Y) sebesar -0,024. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan pemanfaatan teknologi informasi sebesar satu satuan akan mengakibatkan penurunan kinerja keuangan sebesar 0,024 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.
- c. Analisis yang dilakukan dengan software SPSS menunjukkan bahwa koefisien regresi hubungan pengendalian internal (X2) dengan kinerja keuangan (Y) adalah sebesar 0,206. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan satu unit pengendalian internal, kinerja keuangan meningkat sebesar 0,206 unit, dengan syarat semua variabel lainnya dianggap konstan.
- d. Koefisien regresi antara sistem informasi akuntansi (X3) dan kinerja keuangan (Y) yang ditunjukkan dengan software SPSS adalah sebesar 0,215. Sederhananya, peningkatan satu unit pada variabel sistem informasi akuntansi menyebabkan peningkatan kinerja keuangan sebesar 0,215 unit, asalkan semua variabel lainnya dianggap konstan.

Selain itu, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen diuji menggunakan hipotesis parsial.

Tabel 3. Uji Parsial (Uji Statistik t)

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardised Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.581	.388		6.659	.000
	X1	-.024	.125	-.032	-.191	.850
	X2	.206	.093	.348	2.215	.033
	X3	.215	.103	.375	2.083	.044

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS Data Primer Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 3, analisis regresi menghasilkan koefisien sebesar -0,024 untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi, 0,206 untuk variabel sistem informasi akuntansi, dan 0,215 untuk variabel pengendalian internal. Berikut adalah model persamaan regresi: Berikut adalah hasil analisis yang dilakukan dengan SPSS versi 25.0. Tujuan uji t ini adalah untuk mengevaluasi atau memvalidasi hipotesis individual. Perhitungan statistik Ordinary Least Squares (OLS) menunjukkan nilai t yang dihitung.

- a. Dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja keuangan organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumbawa. Hasil uji empiris hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan kinerja keuangan menunjukkan nilai p (sig) sebesar 0,850 ($> 0,05$) dan nilai t hitung sebesar -0,191, yang lebih kecil dari nilai t (nilai t hitung -0,191 $<$ nilai t 1,684). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa tidak dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi.
- b. Dampak pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja keuangan organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumbawa. Nilai t estimasi sebesar 2,215, yang lebih tinggi dari t-tabel ($2,215 > 1,684$), dan nilai p (sig) sebesar 0,033 ($< 0,05$) merupakan hasil uji empiris hubungan antara pengendalian internal dan kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengendalian internal.
- c. Dampak Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. Nilai t yang ditentukan sebesar 2,083, yang lebih tinggi dari t-tabel ($2,083 > 1,684$), dan nilai p (sig) sebesar $0,044 < 0,05$ merupakan hasil uji empiris hubungan antara sistem informasi akuntansi dan kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh sistem informasi akuntansi.

Intinya, uji koefisien determinasi (R^2) menilai seberapa baik model dapat memperhitungkan variabel independen, yaitu kinerja keuangan. iTabel iberikut ini menampilkan ihasil iuji ikoefisien ideterminasi:

Tabel 4. Koefisien Determinasi (R^2)

Model				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.626 ^a	.392	.347	.19555

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Output SPSS Data Primer Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4, hasil analisis menunjukkan nilai R-squared yang disesuaikan sebesar 0,392, yang signifikan dalam tabel ringkasan model. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan penggunaan teknologi informasi, berkontribusi sebesar 39,2% terhadap variabel dependen,

yaitu kinerja keuangan. Sementara itu, faktor-faktor lain yang memengaruhi kesuksesan keuangan, seperti sumber daya manusia, efektivitas dan efisiensi administrasi anggaran, serta kualitas pelaporan keuangan, berkontribusi sebesar 60,8%.

Selain itu, uji simultan bertujuan untuk memverifikasi atau menguji premis bahwa "kinerja keuangan OPD kabupaten/kota secara signifikan dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi, pengendalian internal, dan sistem informasi akuntansi." Hasil perhitungan uji-F, yang menampilkan nilai-nilai berikut, mengilustrasikan uji simultan tersebut:

Tabel 5. Hasil Uji Pengaruh Simultan (F test)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.987	3	.329	8.601	.000 ^b
	Residual	1.530	40	.038		
	Total	2.516	43			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Output SPSS Data Primer Diolah, 2025

Karena hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern, dan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan OPD memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, serta nilai F hitung sebesar 8,601 lebih besar dari F tabel sebesar 2,84 ($F_{hitung} 8,601 > F_{tabel} 2,84$), maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan ketiga faktor tersebut secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan OPD Kabupaten Sumbawa.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1) Terhadap Kinerja Keuangan (Y)

Hipotesis awal penelitian ini menyatakan bahwa kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumbawa tidak berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan OPD Kabupaten Sumbawa. Kesimpulan ini didukung oleh nilai t hitung sebesar -0,191, lebih kecil dari nilai t tabel ($-0,191 < 1,684$), dan nilai p (sig) sebesar 0,850, melebihi ambang batas 0,05.

Temuan analisis penelitian menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan OPD. Bahwasanya, secara fakta lapangan dapat disimpulkan bahwa instansi tempat bekerja tidak

menerapkan penjadwalan pemeliharaan komputer secara rutin, sehingga berdampak pada menurunnya kinerja perangkat, sering terjadinya gangguan sistem, serta keterlambatan dalam proses pengolahan dan pelaporan data keuangan. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan teknologi tidak optimal karena pegawai sering mengalami hambatan teknis yang seharusnya dapat dicegah melalui perawatan berkala dan dukungan teknis yang memadai.

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, khususnya oleh Oktavianie (2022) dan Saifudin & Munari (2023), penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian dari studi sebelumnya mendukung kesimpulan studi ini bahwa kinerja keuangan OPD tidak dipengaruhi oleh variabel pemanfaatan teknologi informasi. Namun, temuan penelitian (Idrus dkk., 2019) dan (Cholis & Fadli, 2021) menunjukkan bahwa adopsi teknologi informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Pengendalian Internal (X2) terhadap kinerja keuangan (Y)

Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa kinerja keuangan akan meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, dibuktikan dengan nilai p-value sebesar 0,033 (kurang dari 0,05) dan nilai t-hitung sebesar 2,215 lebih besar dari nilai t-tabel ($2,215 > 1,684$). Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumbawa.

Analisis penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan instansi pemerintah daerah (OPD) dipengaruhi oleh variabel pengendalian internal. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa menghasilkan data kinerja keuangan yang lebih baik jika sistem pengendalian internalnya lebih tangguh. Setiap OPD akan terdorong untuk menjalankan tugas dan mencapai tujuannya secara efektif dan efisien melalui sistem pengendalian internal yang tangguh. Untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah di setiap periode, sistem pengendalian internal dalam pelaporan keuangan harus ditinjau ulang.

Menurut penelitian sebelumnya (Palalangan, 2020; Sukmawati & Susilo, 2023; Rosita, 2014), pengendalian internal meningkatkan kinerja keuangan instansi pemerintah daerah (OPD). Hasil ini sejalan dengan kesimpulan penelitian yang menyatakan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan OPD. Namun, kesimpulan ini berbeda dengan penelitian yang menunjukkan tidak adanya hubungan antara kinerja keuangan dan pengendalian internal (Sukmawati & Susilo, 2023; Sustris Devi Yunita dkk., 2024).

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (X3) Terhadap Kinerja Keuangan (Y)

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara sistem informasi akuntansi dengan kinerja keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumbawa. Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,083 lebih besar dari t tabel ($2,083 > 1,684$) dan nilai p (sig) sebesar 0,044 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga kinerja keuangan OPD di Kabupaten Sumbawa dipengaruhi secara positif oleh sistem informasi akuntansi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Faktanya, keberadaan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dan terpercaya telah mempercepat proses pencatatan, pelaporan dan pengambilan keputusan keuangan pada OPD di Kabupaten Sumbawa. Hal ini menunjukkan bagaimana efisiensi proses pelaporan keuangan, ketepatan waktu dan akuratan data dapat ditingkatkan secara signifikan melalui penerapan sistem informasi akuntansi yang kuat. Karena itu, agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tata kelola keuangan yang terbuka dan akuntabel, sistem informasi akuntansi sangatlah penting.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berdampak signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan instansi pemerintah daerah (OPD) (Pratiwi dkk., 2022; Zubaidah, 2020). Sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menemukan bahwa variabel sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan OPD. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan sedikit hubungan antara sistem informasi akuntansi dan kesuksesan keuangan (Bale dkk., 2023).

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi (X1), pengendalian internal (X2), dan sistem informasi akuntansi (X3) terhadap kinerja keuangan (Y).

Analisis data menunjukkan bahwa kinerja keuangan OPD dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh penggunaan sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan teknologi informasi secara bersamaan. Proses pengelolaan keuangan OPD menjadi lebih terarah, efisien, dan akuntabel dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat, didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai dan sistem informasi akuntansi yang akurat. Hal ini merupakan komponen krusial dalam mendorong pencapaian kinerja keuangan OPD yang optimal. Kinerja informasi yang dihasilkan pemerintah daerah, baik sebelum maupun sesudah penggunaan sistem komputerisasi, menunjukkan hubungan yang irelevan

antara teori kegunaan keputusan dan penggunaan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan sistem informasi akuntansi. Integrasi dan keberlanjutan ketiga elemen ini merupakan dasar bagi kinerja keuangan yang kuat.

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05, terhadap kinerja keuangan OPD. Lebih lanjut, nilai F hitung sebesar 8,601 ($F_{hitung} > F_{tabel} 2,84$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan teknologi informasi secara simultan memiliki pengaruh yang baik dan signifikan terhadap kinerja keuangan OPD Kabupaten Sumbawa.

Pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal, dan sistem informasi akuntansi semuanya berdampak pada keberhasilan keuangan OPD, menurut temuan penelitian sebelumnya (Putri, 2020; Widodo, 2018). Variabel pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal, dan sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan OPD, menurut penelitian terbaru yang didukung oleh temuan sebelumnya. Secara teoritis, kinerja keuangan organisasi pemerintah daerah (OPD) dapat ditingkatkan melalui efek komplementer teknologi informasi, pengendalian internal, dan sistem informasi akuntansi. Menurut teori model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean (2003), kualitas sistem, informasi, dan pelayanan yang memengaruhi penggunaan dan kepuasan pengguna, yang pada gilirannya menghasilkan manfaat bersih seperti efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan, menentukan keberhasilan implementasi sistem informasi, termasuk teknologi informasi dan SIA. Selain itu, sesuai Teori Resource-Based View (RBV) (Barney, 1991), pemanfaatan TI dan AIS yang dikelola secara efektif dapat berkembang menjadi aset strategis yang menghasilkan keunggulan kompetitif melalui efektivitas biaya, ketepatan pelaporan, dan manajemen pengeluaran regional. Di sisi lain, ikerangka ikerja iCOSO i(Committee iof iSponsoring iOrganizations iof ithe iTreadway iCommission) imenjelaskan idampak ipengendalian iinternal. Kerangka kerja ini menyoroti bagaimana sistem pengendalian internal yang efisien, yang mencakup elemen-elemen seperti penilaian risiko, aktivitas pengendalian, dan pemantauan, dapat meningkatkan akuntabilitas, menghentikan penipuan, dan menjamin akurasi laporan keuangan. Klaim bahwa IT, pengendalian internal, dan AIS memiliki dampak positif dan substansial terhadap pencapaian kinerja keuangan OPD didukung oleh integrasi ketiga metode teoretis ini.

KESIMPULAN

Dengan menelaah hasil pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Kinerja keuangan organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumbawa (Y) tidak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pemanfaatan teknologi informasi (X1). Bahwasanya, secara fakta lapangan dapat disimpulkan bahwa instansi tempat bekerja tidak menerapkan penjadwalan pemeliharaan komputer secara rutin, sehingga berdampak pada menurunnya kinerja perangkat, sering terjadinya gangguan sistem, serta keterlambatan dalam proses pengolahan dan pelaporan data keuangan. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan teknologi tidak optimal karena pegawai sering mengalami hambatan teknis yang seharusnya dapat dicegah melalui perawatan berkala dan dukungan teknis yang memadai. (2) Pengendalian internal (X2) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan (Y) organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumbawa. Bahwasanya secara fakta lapangan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sistem pengendalian internal pemerintah di Kabupaten Sumbawa, maka semakin baik pula nilai informasi kinerja keuangan yang akan dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa. (3) Sistem informasi akuntansi (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Y) organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumbawa. Bahwasanya secara fakta lapangan, keberadaan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dan andal telah membantu mempercepat proses pencatatan, pelaporan, serta pengambilan keputusan keuangan di OPD di Kabupaten Sumbawa. (4) Pemanfaatan teknologi informasi (X1), pengendalian internal (X2), dan sistem informasi akuntansi (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Y) organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumbawa. Bahwasannya dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang baik, didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai serta sistem informasi akuntansi yang akurat, maka proses pengelolaan keuangan OPD menjadi lebih terarah, efisien, dan akuntabel serta merupakan faktor kunci dalam mendorong tercapainya kinerja keuangan yang optimal pada OPD.

Rekomendasi berikut diajukan untuk studi mendatang: Studi tersebut sebaiknya mencakup variabel independen tambahan, seperti sumber daya manusia dan kepatuhan terhadap peraturan keuangan, yang memiliki dampak yang dapat diprediksi terhadap kinerja keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem informasi akuntansi secara maksimal, memperkuat sistem pengendalian internal, serta menjamin akuntabilitas dan

transparansi dalam seluruh pelaporan keuangan, diharapkan OPD di Kabupaten Sumbawa dapat mempertahankan kinerja keuangan yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bale, P. J., Marlina, I. T., & Muanas, M. I. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Informatika Kesatuan*, 3(2).
- Cholis, N., I & I. Fadli, F. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas Publik dan Kinerja Keuangan Organisasi Perangkat Daerah. *Journal of Fairness*, 7(2), 127–136.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64.
- Idrus, M. I., Adziem, F., & Nayun, H. (2019). Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT PLN (PERSERO) Area Makassar Selatan. *Jurnal Ekonomi Invoice*, 1(1), 156–173.
- Komarasari, W. (2013). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah. *Repository Universitas PGRI Yogyakarta*, 1–19.
- Lubis. (2019). Pengaruh budaya organisasi terhadap adopsi teknologi internet di lingkungan aparat pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar. *Ulul Albab*, 23(2), 117–122.
- Nurillah, A. S., & Muid, D. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 2–13.
- Oktavianie, R. (2022). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Smart Accounting iJournal*, 10(2), 29–46.
- Palalangan, C. A. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Mamasa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), 121.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2015. (2015). Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, 1–14.
- Pratiwi, A., Vonna, S. M., & Harmi, M. (2022). Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintahan Nagari Raya. *Jurnal Sains Riset*, 12(2), 456.
- Puspita, D., Fadli, F., & Halimatusyadiah, H. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Seluma. *Journal of Fairness*, 10(2), 79–88.

- Putri. i(2020). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal terhadap kinerja keuangan.
- Rosita. (2014). Pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2010.
- Saifudin, I. A., & Munari, M. (2023). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kualitas SDM, dan kebijakan pemerintah terhadap kinerja keuangan. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 6(2), 2470–2480.
- Saputra, I., Anggraini, W., Adekantari, R., Pebrianti, S., Ilham, F. N., Kamula, R., Studi, P., Universitas, A., & Sumbawa, T. (2025). Transparansi keuangan pemerintah daerah Sumbawa: menghadapi tantangan dan menemukan. 2(3), 3132-3137.
- Sugiyono. (2021). *Buku Metode Penelitian Komunikasi*.pdf.crdownload (pp. i1–718).
- Sukmawati, N. D., & Susilo, D. E. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Pengendalian Internal Manajemen Terhadap Kinerja Keuangan Pada
- Sultan, I Iakbar Iwahyu. (2022). Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2011–2022). i1–22.
- Sustri Devi Yunita, Sari Yanti, Nadya Novianty, Analisa. (2024). Pengaruh penerapan pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Banjarmasin. *Akmen Jurnal Ilmiah* 21(3), 268–280.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. 1–106.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Widodo. (2018). Dipengaruhi oleh pemanfaatan IT, SIA, dan pengendalian internal.
- Zubaidah, S. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi.